

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negara-negara di dunia, khususnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan/kondisi ketidakmampuan individu/kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu SDM yang kurang memadai. Hal ini, karena masyarakat miskin cenderung memiliki pendidikan yang sangat rendah, sehingga tidak mampu bersaing yang pada akhirnya menjadi pengangguran. Salah satu Kota yang masih memiliki permasalahan mengenai kemiskinan yaitu Kota Yogyakarta.

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2017), menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Maret tahun 2017 yaitu sebesar 13,02 persen. Kemudian, apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada bulan September tahun 2016, sebesar 13,10 persen. Hal ini, berarti dalam jangka waktu setengah tahun telah terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,08 poin. Sedangkan untuk jumlah kemiskinan pada bulan Maret tahun 2016, persentase penduduk miskin yaitu sebesar 13,34 persen dan mengalami penurunan sebesar 0,32 poin. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengalami penurunan dari

bulan dalam jangka waktu 1 tahun antara tahun 2016 hingga tahun 2017. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut, dipengaruhi dari program-program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat.

Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan. Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara.

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Pada awalnya, program BPNT merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan. Dalam (cpps.ugm.ac.id, 2017), menjelaskan bahwa pergantian program Rastra menjadi BPNT, dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yaitu : *Pertama*, dapat dilihat dari indikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan Exclusion Error dan Inclusion Error yang tinggi. Exclusion error misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Rastra tersebut. Sementara, Inclusion Error sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut.

Kedua, indikator tepat jumlah masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per-bulan dari yang

seharusnya sebanyak 15 kg per-bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp 1.600 per-kg. *Ketiga*, untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan.

Melihat dari permasalahan-permasalahan dari program Rastra tersebut, maka pada tahun 2016 hingga 2017, pemerintah mulai melakukan perubahan terkait skema program Rastra, menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain-lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu.

Dalam (www.m.antaranews.com, 2017) menjelaskan bahwa Program BPNT, pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 kota di wilayah timur. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima BPNT di Indonesia yaitu berjumlah 1.286.000 jiwa, dengan total bantuan yang diberikan sebesar 1,7 triliun. Salah satu kota yang telah menerapkan program BPNT adalah Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan program BPNT mulai dilaksanakan pada awal tahun 2017 dan memiliki jumlah penerima bantuan sosial pada tahap I, sebesar 17.572 peserta. Kemudian, jumlah penerima bantuan sosial mengalami kenaikan pada tahap II

hingga tahap IV yaitu sebesar 17.634 peserta. Masyarakat yang telah terdaftar menjadi peserta KPM, selain akan mendapat bantuan sosial dari program BPNT, peserta tersebut akan secara otomatis terdaftar menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Di dalam Kartu KKS elektronik tersebut, terdapat sistem Saving account dan e-Wallet/dompot elektronik, sehingga peserta KPM dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.

Untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial, maka Kementerian Sosial telah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan atau disingkat E-Warong Kube PKH. E-Warong Kube PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh Kube Jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota Kube. E-Warong merupakan sarana pembayaran yang dilaksanakan secara elektronik/non-tunai, sehingga mempermudah dalam penerimaan bantuan program BPNT.

E-Warong di Kota Yogyakarta telah diresmikan pada pertengahan tahun 2016 dan mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2017, dikarenakan adanya keterlambatan dalam pemenuhan operasional di e-Warong tersebut. E-Warong di Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sebanyak 20 e-Warong, yang dimana

sebanyak 12 e-Warong telah beroperasi dan 8 e-Warong masih dalam proses pelaksanaan. Salah satu e-Warong yang telah berjalan di Kota Yogyakarta yaitu terletak di Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Di e-Warong, peserta penerima manfaat dapat menggunakan saldo yang tersedia dalam kartu KKS, untuk membeli sembako di e-Warong yang memiliki harga di bawah pasar. Untuk satu e-Warong, mampu melayani 500 hingga 1000 peserta penerima manfaat. Dengan adanya e-Warong tersebut, diharapkan penyaluran bantuan BPNT akan lebih tepat efektif dan efisien.

Selanjutnya, untuk mendukung pengelolaan e-Warong, maka Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kota Yogyakarta telah bekerjasama dengan HIMBARA (Himpunan Bank-bank Negara) seperti Bank BNI, BRI, BTN dan Mandiri serta Badan Usaha Logistik (Bulog)/Koperasi. Untuk Kota Yogyakarta, Bank yang telah bekerjasama dengan e-Warong adalah Bank BNI. Kemudian, Kemensos dan Dinsos juga telah melakukan kerjasama dengan KMIS, Pendamping sosial dan Kube Jasa yang beranggotakan peserta penerima manfaat. Dalam melakukan transaksi, peserta yang dapat mencairkan dana tersebut adalah mereka yang telah memiliki KKS elektronik.

Berdasarkan uraian terkait penyaluran bantuan sosial di atas, maka dapat disimpulkan bahwa good governance di Kota Yogyakarta belum berjalan dengan baik. Hal ini, dapat dilihat dari masih banyaknya permasalahan-permasalahan penyaluran bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Atas dasar tersebut, maka diperlukan suatu penelitian tentang Efektivitas E-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan dalam mengoptimalkan penerimaan Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT) di Kota Yogyakarta, agar tujuan dari dilaksanakannya program e-Warong dapat tercapai.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas E-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan dalam mengoptimalkan penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Yogyakarta Tahun 2017 ?
2. Bagaimana hubungan kerjasama antar stakeholder dalam mewujudkan Efektivitas E-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas e-Warong dalam mengoptimalkan penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Yogyakarta Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui keterlibatan stakeholder dalam mewujudkan Efektivitas e-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan dalam mengoptimalkan penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Yogyakarta Tahun 2017.

Kemudian, manfaat dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tentang e-Warong dalam mengoptimalkan Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai.
 - b. Memberikan tolak ukur dan acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan kepada pembaca dan mahasiswa tentang e-Warong dalam mengoptimalkan Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Yogyakarta.
 - b. Menjadi bahan pertimbangan terhadap pemecahan masalah terkait pengelolaan E-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan.

D. Tinjauan Pustaka

E-Warong Kube PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh Kube Jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota Kube. Program e-Warong merupakan sarana pembayaran yang dilaksanakan secara elektronik/non-tunai, sehingga mempermudah dalam penerimaan dana bantuan sosial. Salah satu, bantuan sosial yang dapat dicairkan di e-Warong yaitu program BPNT. Program BPNT merupakan bantuan pangan yang disalurkan secara non-tunai melalui mekanisme akun elektronik, yang disalurkan oleh pemerintah kepada peserta KPM dan hanya dapat dicairkan dalam bentuk pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Himbara. Masing-masing peserta KPM akan mendapat kartu KKS elektronik sesuai dengan data-data nama peserta yang telah ditetapkan.

Pemerintah dapat menyalurkan dana bantuan sosial program BPNT melalui Kartu KKS sebesar Rp. 110.000, per-bulan. Untuk mengoptimalkan program BPNT, maka Kementerian Sosial telah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan atau disingkat E-Warong Kube PKH. Selain itu, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Peraturan ini dibuat, agar seluruh bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, dapat disalurkan secara non tunai.

Uang non-tunai memberikan kemudahan bagi konsumen, karena tidak memerlukan uang cash dan dapat menghemat waktu, sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan efisien. Pada saat ini, telah banyak penelitian terkait uang elektronik/non-tunai yang berjalan di Indonesia seperti: Widyastuti, K., Handayani, P. W., & Wilarso, I. (2017); Anggraeni, F. N., & Prasetyo, P. E. (2017); Abidin, M. S., & Anwar, M. K. (2015); Ramdani, D. D., Gandana, R. S., Setyamarta, N., & Aulina, L. (2015).

Salah satu penelitian mengenai Uang Elektronik/non-tunai ditulis oleh Widyastuti, K., Handayani, P. W., & Wilarso, I. (2017) dalam Jurnal *Tantangan dan Hambatan Implementasi Uang Elektronik di Indonesia*. Dalam penelitian ini mencoba untuk memberikan penilaian terkait implementasi e-money/uang elektronik dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Pengukuran dari hasil implementasi uang elektronik tersebut dilakukan menggunakan metode wawancara dan survei, yang kemudian mendapat kesimpulan yaitu infrastruktur yang memadai, tingkat kepuasan dan penerimaan terhadap uang elektronik X sudah berjalan dengan baik.

Namun, preferensi pengguna untuk memilih produk uang elektronik X, dibandingkan produk uang elektronik lainnya masih cukup baik. Dalam jurnal ini, peneliti juga menjelaskan, faktor penghambat yang dihadapi nasabah uang elektronik X yaitu : keterbatasan merchant, keterbatasan metode akses, keterbatasan channel transaksi, biaya transaksi, kompetitor produk sejenis, serta pengaruh faktor sosial budaya.

Kemudian, penelitian lain yang juga menjadi rujukan dalam penelitian mengenai uang elektronik/non-tunai yaitu ditulis oleh Anggraeni, F. N., & Prasetyo, P. E. (2017), dalam Jurnal *Kesiapan Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Fasilitas Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan masyarakat, manfaat dan hambatan penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengambilan sampel populasi. Teknik pengambilan data primer yang digunakan antara lain kuesioner, Forum Group Discussion, Observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi persentase. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh beberapa kesimpulan bahwa seluruh masyarakat penerima dana PKH di Desa Genting sudah dapat dinyatakan siap untuk menggunakan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH dan diharapkan program tersebut dapat di implementasikan segera.

Manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH adalah efektifitas dan efisiensi dari segi biaya transportasi, jarak tempuh lebih dekat, notifikasi penyaluran dana dapat lebih cepat, uang dapat diambil sewaktu-waktu, kemudahan transfer, serta menjadi jembatan awal masyarakat untuk masuk ke dalam sektor keuangan dengan kepemilikan rekening di lembaga keuangan formal yang menjadi pintu masuk untuk mengakses layanan keuangan seperti tabungan dan kredit. Kendala penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH adalah masih ada masyarakat yang belum memiliki

handphone dan masyarakat yang belum memiliki pengetahuan mengenai uang elektronik.

Selanjutnya, penelitian lain yang berkaitan dengan uang elektronik yang lebih mengarah kepada good governance yaitu: Abidin, M. S., & Anwar, M. K. (2015) dalam Jurnal *Dampak Kebijakan E-money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai uang elektronik/e-money yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur sektor moneter dan regulasi tentang sistem pembayaran yang lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian ini juga menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dengan diterapkannya e-money adalah sebagai berikut :

Pertama, Dampak E-money Terhadap Penerbit (Issuer) yaitu memberikan keuntungan bagi bank atau lembaga penerbit, karena penggunaan uang elektronik sangat mudah digunakan, praktis dan mempercepat proses transaksi, sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan uang elektronik tersebut. *Kedua*, Dampak E-money Terhadap Pengusaha (Merchant) yaitu mampu meningkatkan profit bagi pengusaha yang kemudian berpotensi untuk mendorong aktivitas usaha dan ekspansi usaha serta meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam setiap proses transaksi, proses transaksi cepat, dan terjaga kemanannya. *Ketiga*, Dampak E-money Terhadap Pengguna Kartu E-money (Customer) yaitu memberikan kemudahan dalam setiap proses transaksi, karena dengan adanya e-money pengguna tidak perlu membawa uang tunai/cash dan terhindar dari kesalahan dalam proses transaksi. Dengan adanya kemudahan tersebut, maka dapat mendorong kenaikan tingkat konsumsi.

Berbanding terbalik dengan beberapa jurnal/disertasi diatas, terdapat salah satu penelitian yang menjelaskan mengenai strategi dalam penerapan uang elektronik/E-money yaitu : Ramdani, D. D., Gandana, R. S., Setyamarta, N., & Aulina, L. (2015) dalam Jurnal *Triple C (Centralize And Comprehensive Concept) Sebagai Usaha Strategis Penerapan E-Money Indonesia*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rujukan dari beberapa sumber antara lain : Wawancara, pengamatan secara langsung dan studi dari berbagai literatur. Selanjutnya, informasi dan data-data yang diperoleh dari sumber sekunder yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang ada, sedangkan sumber primer dilakukan dengan wawancara kepada salah satu bank pemerintah dan swasta.

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan e-money dengan menggunakan Teori Triple C (Centralized and Comprehensive Concept) sebagai rencana strategis dalam penerapan e-money di Indonesia. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Triple C yaitu sebagai berikut : *Pertama*, mewujudkan Centralized Concept; *Kedua*, mewujudkan Comprehensive Concept; *Ketiga*, menerapkan kedua konsep dan melakukannya dengan konsisten berkelanjutan; *Keempat*, dilakukan evaluasi program secara terus menerus/berkala dan peningkatan dan perbaikan dari kebijakan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hasil dari diterapkannya metode Triple C adalah mewujudkan uang elektronik/e-money di Indonesia, sekaligus mengintegrasikan seluruh jaringan produk e-money di Indonesia dan menciptakan masyarakat yang cerdas dan mampu memanfaatkan e-money dengan baik.

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa belum ada yang melakukan penelitian mengenai Efektivitas e-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan dalam mengoptimalkan penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Yogyakarta. E-Warong merupakan program yang baru dilaksanakan, karena mulai diterapkan pada pertengahan tahun 2017. Dari tinjauan pustaka diatas, penelitian yang sering diambil yaitu mengenai strategi, dampak, implementasi, upaya, pelaksanaan, hambatan dari uang elektronik/non-tunai. Selanjutnya, penelitian ini juga akan melihat efektivitas pengelolaan e-Warong yang nantinya akan diukur menggunakan satu prinsip good governance yaitu, Efektivitas. Kemudian, Indikator efektivitas dalam penelitian ini menggunakan teori menurut (Sutrisno, 2007: 125-126) yang terdiri dari 5 Indikator yaitu: Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Dengan adanya indikator tersebut, maka dapat diukur sejauh mana pengelolaan e-Warong yang telah dilaksanakan. Kemudian, dalam penelitian ini juga akan melihat hubungan kerjasama antara pemerintah, bank-bank yang terkait, pihak bulog atau koperasi dan Kube jasa/masyarakat yang mengelola e-Warong tersebut, dengan menggunakan 3 pilar good governance yaitu: Negara/Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat. Konsep 3 pilar utama ini, bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan kerjasama antara negara, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan e-Warong tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu, kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga data yang dikumpulkan dapat lebih akurat.

E. Kerangka Teori

1. Efektivitas

1) Definisi Efektivitas

Kata efektif adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu, *effective* yang memiliki arti hasil/ukuran dalam mencapai suatu tujuan. Suatu kegiatan atau program dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai target yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan unsur penting dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, berdasarkan perbandingan antara output dan input yang dihasilkan. Efektivitas dapat digunakan untuk mengukur tujuan dari suatu organisasi, lembaga, kegiatan, program dan lain sebagainya.

Menurut Hans Kartikahadi yang dikutip Agoes Sukirno (dalam Cicilia et al, 2015), menjelaskan bahwa efektivitas adalah produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik di tinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan.

Sedangkan, menurut Mardiasmo (dalam Cicilia et al, 2015), mendefinisikan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas perbandingan outcome dengan output.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan baik dari segi kualitas, kuantitas, waktu dan lain sebagainya. Dengan kata lain,

efektivitas merupakan output atau hasil dari pelaksanaan dari suatu kegiatan dan sekaligus menjadi suatu tolak ukur keberhasilan dari suatu kegiatan.

2) Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas dapat dilakukan menggunakan berbagai indikator berdasarkan konsep dan teori yang ada. Ukuran efektifitas menjadi tolak ukur dalam melakukan analisis suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Efektifitas tersebut, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari pada siapa yang menilai dan menginterpretasikannya.

Menurut (Sutrisno, 2007: 125-126) menjelaskan bahwa ukuran efektivitas program di dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut:

a) Pemahaman Program

Pemahaman program dalam hal ini, dapat berkaitan dengan sejauh mana kelompok kepentingan atau stakeholder mengetahui dan memahami kegiatan program serta mengenai sosialisasi tentang e-Warong tersebut.

b) Tepat Sasaran

Tepat sasaran yaitu, dilihat dari adanya kesesuaian sasaran program dengan tujuan yang telah ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang kongkret, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif.

c) Tepat Waktu

Merupakan, jangka waktu pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam tata kelola e-Warong adalah proses pencairan dana bantuan sosial melalui e-Warong, harus dapat dicairkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga dapat menentukan efektif atau tidaknya program tersebut.

d) Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan yaitu, diukur melalui pencapaian tujuan yang telah dilaksanakan baik melalui pelatihan program, maupun dengan kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya program.

e) Perubahan Nyata

Dapat diukur, melalui sejauh mana pelaksanaan kegiatan e-Warong memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan yang nyata bagi masyarakat.

Kemudian, Menurut Richard M. Steers (dalam Tangkilisan, 2005) menjelaskan bahwa terdapat 3 indikator dalam pengukuran efektivitas, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar

pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti jangka waktu yang dibutuhkan. Pencapaian tujuan ini terdiri dari 3 indikator yaitu, kurun waktu, sasaran dan dasar hukum yang merupakan target kongkret.

b) Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk dapat mengadakan sosialisasi, komunikasi dan sebagai pengembangan konsensus. Akan tetapi pada intinya, integrasi lebih menekankan kepada proses sosialisasi.

c) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam hal ini dapat berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang telah ditentukan dengan penerapannya di lapangan dan sarana-prasarana yang memadai.

Selanjutnya, terdapat unsur-unsur yang dapat digunakan untuk mengukur suatu efektivitas yaitu, menurut Gibson et al (dalam Arif, 2017: 12-13), menjelaskan bahwa ukuran efektivitas organisasi terdiri dari lima unsur, yaitu :

a) Produksi

Produksi dalam kriteria efektivitas merupakan sebuah ukuran keluaran yang dihasilkan dari suatu organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, dokumen yang diproses, konsumen yang dilayani, dan sebagainya.

b) Efisiensi

Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, biaya per orang, dan sebagainya.

c) Kepuasan

Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya. Ukuran kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan, dan sebagainya.

d) Keadaptasian

Keadaptasian sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan pelanggan, kualitas produk, dan sebagainya, serta perubahan internal seperti ketidakefisienan, ketidakpuasan dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan.

e) Kelangsungan Hidup

Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggungjawab organisasi perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

Untuk kriteria atau ukuran dalam efektivitas juga dikemukakan oleh Siagian (dalam Sanjaya, 2015:11-13), efektivitas terdiri dari 8 kriteria yaitu sebagai berikut:

a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam pelaksanaan kegiatan/kebijakan harus sesuai dengan sasaran dan tujuan dari organisasi bisa tercapai.

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.

Strategi diperlukan sebagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, agar pihak pelaksana kegiatan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tujuan.

c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.

Analisis dan perumusan kebijakan berfungsi untuk mencapai tujuan dan strategi yang telah ditentukan, dalam artian kebijakan yang dibuat harus dapat menjabatani tujuan yang ada melalui pelaksanaan kegiatan operasional.

d) Perencanaan yang matang.

Dalam pembuatan kebijakan, harus dilakukan perencanaan yang tepat dan mempertimbangkan seluruh aspek yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang, dapat terstruktur dengan baik.

e) Penyusunan program yang tepat.

Dalam pelaksanaan kegiatan, diperlukan penyusunan yang tepat, karena akan menjadi arah/alur dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja,

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia, maka dapat mendukung serta mengoptimalkan kinerja.

g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Suatu program harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena sebagai tolak ukur dari proses serta output yang dihasilkan. Apabila, dalam pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, maka efektif dan efisien dikatakan tidak berhasil/gagal.

h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Pengawasan dan pengendalian diperlukan dalam suatu pelaksanaan kegiatan, karena dapat mengontrol dan mengendalikan kegiatan sesuai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu gambaran seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil dari diselenggarakannya suatu kegiatan atau program, yang dapat menyatakan sejauh mana capaian dari suatu tujuan serta ukuran berhasil atau tidaknya suatu kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Indikator efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menurut (Sutrisno, 2007: 125-126), yang dimana ukuran efektivitas dalam suatu organisasi dapat diukur menggunakan 5 (lima) indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Kemudian, dalam penelitian ini juga akan mengacu kepada 3 pilar Good Govenance yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dalam pelaksanaan good governance, diperlukan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan suatu kegiatan/program agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. *Pertama*, pemerintah memiliki peranan untuk memberikan arahan, memfasilitasi kegiatan pembangunan, memberikan peluang kepada masyarakat dan sektor swasta agar lebih terlibat dalam proses kegiatan pembangunan tersebut.

Kedua, sektor swasta memiliki fungsi sebagai pelaku utama dalam pembangunan, sebagai penggerak dalam proses pembangunan, menciptakan lapangan kerja dan berperan sebagai kontributor utama terhadap penerimaan anggaran pemerintah dan daerah. *Ketiga*,

masyarakat memiliki peran utama dalam proses pembangunan karena berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan, meningkatkan fungsi produksi maupun fungsi konsumsi dan meningkatkan kualitas produksi.

Menurut Dwiyanto (dalam Putra, 2017: 9-10), menjelaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance, secara garis besar dapat dibagi kedalam tiga pilar yaitu:

1) Negara/Pemerintahan.

Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Selain itu, pemerintah juga berfungsi dalam hal regulasi/pembuatan kebijakan publik, pengendalian dan pengawasan publik, fasilitas kepentingan negara dan publik serta pelayanan kepentingan publik.

2) Sektor Swasta

Sektor swasta dalam hal ini, merupakan perusahaan yang aktif dalam penyelenggaraan sistem pasar seperti perdagangan dan industri. Selanjutnya, sektor swasta berfungsi sebagai penggerak aktivitas di bidang ekonomi, penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan bangsa penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan serta penyelenggaraan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

3) Masyarakat

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan, pada dasarnya berada ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Selain itu, masyarakat juga memiliki fungsi yaitu posisinya sebagai subjek dan objek bagi pihak-pihak penyelenggaraan yang dilakukan oleh Negara/pemerintah dan swasta serta mengontrol kinerja pemerintah dan swasta.

Dari penjelasan diatas, hubungan kerjasama antar stakeholder, khususnya dari pihak swasta dan masyarakat sangat diperlukan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, karena berfungsi sebagai penggerak perekonomian dan pelaksana kegiatan. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, sektor swasta dan masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam menjalankan proses pembangunan. Kemudian, untuk dapat mengukur sejauh mana pengelolaan e-Warong, maka penelitian ini akan merujuk kepada 1 (satu) prinsip Good Governance yaitu Efektivitas. Prinsip ini sangat diperlukan, karena mampu memberikan analisis lebih mendalam terkait pengelolaan e-Warong tersebut.

2. Teori Sistem Informasi Manajemen

a. Definisi Sistem Informasi Manajemen

Pada dasarnya, kata “sistem” merupakan kata yang berasal dari Yunani yang memiliki arti *systema*, yang berarti komponen yang saling

berhubungan satu sama lain secara terstruktur dan merupakan satu kesatuan. Sistem adalah suatu rangkaian struktur dan proses yang saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang teratur. Dalam kaitannya dengan sistem informasi manajemen, yaitu sebagai rangkaian kegiatan pengelompokan data yang akan diproses dan dikelola menjadi suatu informasi yang dibutuhkan bagi pengguna.

Menurut Hall (dalam Ellyana et al, 2009: 74), menjelaskan bahwa sistem informasi adalah suatu rangkaian dari prosedur formal, yang dimana seluruh data yang telah dikumpulkan akan diproses menjadi sebuah informasi dan informasi tersebut nantinya akan didistribusikan kepada para pengguna atau kelompok/individu yang membutuhkan. Dalam sistem informasi, diperlukan adanya tahapan-tahapan dari pelaksanaan informasi, karena terdapat berbagai macam kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna informasi. Sistem informasi memiliki beberapa kriteria yaitu, fleksibel, efektif dan efisien.

Menurut Gordon B. Davis dalam Jogiyanto (2005) yang dikutip (Putra, 2016: 8), menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu hasil dari serapan teknologi baru kepada persoalan keorganisasian dalam mendukung pengolahan transaksi dan sekaligus sebagai pemberian informasi untuk kepentingan keorganisasian. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk memberikan seluruh informasi yang dapat memberikan pengaruh kepada kinerja organisasi.

Dalam kaitannya dengan sistem informasi pemerintahan adalah penggunaan sistem teknologi informasi dalam proses tata kelola negara untuk mendukung pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dan mampu menghubungkan keperluan masyarakat, bisnis, kegiatan dan lain sebagainya. Selain itu, dengan menggunakan teknologi informasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih efisien dan tepat waktu. Tujuan dari sistem informasi pemerintah adalah memberikan kemudahan kepada pemerintah untuk dapat mengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan melalui output yang dihasilkan dari sistem informasi dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan adalah suatu tata kelola pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan menggunakan teknologi informasi yang lebih praktis dan efisien. Sistem informasi digunakan dalam pengambilan keputusan, karena memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam membuat suatu kebijakan. Selanjutnya, dengan adanya sistem informasi dapat mempermudah pemerintah dalam menjalin hubungan kerjasama antara sektor swasta dan masyarakat. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan yang telah dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat serta memberikan data yang relevan dan akurat.

b. Elemen Dasar Sistem Informasi

Kemudian, menurut Sutanta (dalam Purnama & Iriani, 2017: 37), menjelaskan bahwa Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1) Input (masukan)

Masukan dari sistem informasi adalah berbagai data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber yang dapat menjelaskan secara lebih detail dan akurat terhadap kajian yang diambil serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

2) Processing (proses)

Proses pengelolaan data yaitu mengumpulkan data-data yang nantinya akan dipilih berdasarkan keperluan dan disusun menjadi data yang lebih mudah dipahami dan dibaca oleh pengguna.

3) Output (keluaran)

Output dari pengolahan data adalah menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat dan mudah dipahami oleh pengguna informasi, sehingga dapat mengurangi kesalahan informasi yang ada.

c. Unsur Sistem Informasi

Dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen, diperlukan unsur-unsur sistem informasi yang bertujuan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Unsur dalam sistem informasi telah dikemukakan oleh Bodnar dan Hopwood dalam Fahmi (2004) yang dikutip (Arifin & Pratolo, 2015: 28-34), menjelaskan bahwa ada tiga hal yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi berbasis komputer yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan pengguna (brainware).

1) Perangkat Keras (hardware)

Perangkat keras atau hardware pada sistem informasi berguna untuk mendukung proses pengelolaan informasi menjadi lebih efisien. Perangkat keras dalam sistem informasi yaitu komputer, keyboard, mouse, CPU dan lain sebagainya.

2) Perangkat Lunak (software)

Perangkat lunak atau software merupakan suatu sistem operasi yang ada di dalam komputer, yang dapat dibaca dan ditulis menggunakan komputer dengan aplikasi yang telah tersedia didalamnya seperti microsoft word, excel dan lain sebagainya.

3) Pengguna (brainware)

Pengguna atau brainware dalam proses sistem informasi adalah manusia/orang yang menggunakan dan mengoperasikan perangkat komputer untuk mempermudah dalam mengolah berbagai data informasi menjadi lebih efektif dan efisien.

d. Indikator Sistem Informasi Manajemen

Untuk memperjelas pelaksanaan dari sistem informasi manajemen diperlukan beberapa indikator dari sistem informasi manajemen. Adapun indikator-indikator dari sistem informasi manajemen yang dikemukakan oleh Gordon B. Davis (dalam Siregar, 2017: 24) yaitu:

1) Informasi

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut.

2) Manusia

Sebagai pengolah informasi peran manusia sangat besar yaitu untuk menciptakan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Baik buruknya informasi yang dihasilkan tergantung dari profesionalitas dari manusia itu sendiri.

3) Konsep sistem

Sistem adalah suatu bentuk kerjasama yang harmonis antara bagian/komponen/sub sistem yang saling berhubungan satu dengan bagian/komponen/sub sistem lainnya untuk mencapai suatu tujuan.

Selain itu sistem tidaklah berdiri sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan intern maupun lingkungan ekstern.

4) Konsep organisasi dan manajemen

Organisasi tidak bisa lepas dari kegiatan manajemen dan begitu pula sebaliknya karena keduanya mempunyai hubungan yang begitu erat dan kuat.

5) Konsep pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan adalah tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu diantara alternatif-alternatif yang dimungkinkan.

6) Nilai informasi

Informasi dapat mengubah sebuah keputusan. Perubahan dalam nilai hasil akan menentukan informasi. Bahwa suatu informasi itu harus dapat menjadi ukuran yang tepat, yang nantinya dapat memberikan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai sistem teknologi informasi yang digunakan untuk memperoleh data-data sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan. Dalam pengumpulan data, harus melalui beberapa tahap dalam menghasilkan informasi yang tepat dan akurat. *Pertama*, Input yang bersumber dari data-data yang ditemukan dan berisi informasi-informasi yang

dapat dipertanggung jawabkan. *Kedua*, Proses yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu, melakukan pengelompokkan data-data yang nantinya akan dipilih berdasarkan keperluan dan menyusun data-data yang ada menjadi informasi yang layak dan mudah dipahami.

Ketiga, Output dari pengolahan data tersebut adalah mampu memberikan informasi yang up to date, relevan dan terpercaya, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seluruh pengguna informasi. Sistem informasi manajemen sangatlah dibutuhkan dalam proses pembangunan, karena mampu mendukung pelaksanaan suatu kegiatan menjadi lebih efektif. Untuk dapat mendukung pengolahan data tersebut, maka dibutuhkan beberapa komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna. Dalam pengolahan data, masing-masing komponen memiliki fungsi yang saling berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan informasi yang relevan.

3. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

a. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Dalam (www.kemsos.go.id), menjelaskan bahwa BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong Kube PKH/pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank Himbara. Tujuan Program BPNT untuk

mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai atau (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pengganti program Rastra/Raskin yang disalurkan secara non-tunai atau menggunakan kartu elektronik yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, yang digunakan hanya untuk membeli bahan kebutuhan pokok seperti beras dan gula. Pencairan dana bantuan sosial dapat dilakukan di e-Warong atau agen yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara.

b. Indikator Program Bantuan Pangan Non Tunai

Untuk mengukur efektivitas program BPNT, maka dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

1) Tepat Sasaran

Dalam melakukan penyaluran bantuan program BPNT, harus diberikan kepada peserta KPM sesuai dengan data yang ada, sehingga mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program.

2) Tepat Jumlah

Dalam menyalurkan bantuan sosial, diperlukan kesesuaian jumlah bahan pangan yang telah ditentukan, dengan pelaksanaannya dilapangan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

3) Tepat Waktu.

Dalam pendistribusian bahan pangan, harus diberikan dengan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga proses penyaluran bansos dapat berjalan dengan efektif.

4) Tepat Kualitas.

Untuk mendukung kesehatan peserta penerima manfaat, bahan pangan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik.

5) Tepat Administrasi.

Dalam pelayanan proses administrasi bahan pangan, harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, sehingga proses administrasi dalam penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efisien.

F. Definisi Konseptual

1. Definisi Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan baik dari segi kualitas, kuantitas, waktu dan lain sebagainya. Dengan kata lain, efektivitas merupakan output atau hasil dari pelaksanaan dari suatu kegiatan dan sekaligus menjadi suatu tolak ukur keberhasilan dari suatu kegiatan.

2. Definisi Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah serangkaian kegiatan pengolahan data dari berbagai sumber yang dilakukan secara menyeluruh untuk memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Proses pengolahan data dapat dilakukan secara bertahap yaitu melalui input, proses dan output yang

dihasilkan. Sistem informasi memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapat informasi yang relevan dan mampu meminimalisir kesalahan informasi yang akan diambil.

3. Definisi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai atau (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non-tunai atau menggunakan kartu elektronik yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan kebutuhan pokok dan dapat dicairkan di e-Warong atau agen yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, akan mengacu kepada 1 Prinsip Good Governance yaitu Efektivitas (Effectivnees). Prinsip ini, digunakan karena dapat mengukur sejauh mana pengelolaan e-Warong dalam mengoptimalkan BPNT di Kota Yogyakarta. Indikator dari Efektivitas adalah sebagai berikut :

a. Pemahaman Program

Pemahaman program dalam hal ini, dapat berkaitan dengan sejauh mana kelompok kepentingan atau stakeholder mengetahui dan memahami kegiatan program serta mengenai sosialisasi tentang e-Warong tersebut.

b. Tepat Sasaran

Tepat sasaran yaitu, dilihat dari adanya kesesuaian sasaran program dengan tujuan yang telah ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang kongkret, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif.

c. Tepat Waktu

Merupakan, jangka waktu pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam tata kelola e-Warong adalah proses pencairan dana bantuan sosial melalui e-Warong, harus dapat dicairkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga dapat menentukan efektif atau tidaknya program tersebut.

d. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan yaitu, diukur melalui pencapaian tujuan yang telah dilaksanakan baik melalui pelatihan program, maupun dengan kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya program.

e. Perubahan Nyata

Perubahan nyata dapat diukur, melalui sejauh mana pelaksanaan kegiatan e-Warong memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan yang nyata bagi masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif lebih mengarah kepada perspektif subjek yang akan diteliti menggunakan riset dan data yang dikumpulkan serta dilakukan analisis lebih mendalam. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan analisis tentang Efektivitas E-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan dalam mengoptimalkan Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Yogyakarta tahun 2017. Metode ini, akan menghasilkan narasi penelitian secara kritis yang tidak memihak pada kekuasaan dan dibangun atas dasar etika moral serta norma-norma yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang bersumber dari jurnal, tesis, artikel dan internet.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah sebuah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan apa yang ada di dalam penelitian. Sumber data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara bersama beberapa sumber yang ditetapkan seperti Pengelola e-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan dan Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Peneliti akan menggali

informasi dari narasumber mengenai tata kelola program e-Warong tersebut.

Data penting yang akan diambil dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan e-Warong, hubungan kerjasama antara pemerintah, Bank BNI dan Bulog/Koperasi serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE), jumlah peserta program BPNT, jumlah e-Warong yang telah berjalan, jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk Program BPNT, fasilitas dan sarana-prasarana yang diberikan dan lain sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak kedua dan seterusnya. Sumber data sekunder dapat berupa data dari arsip, makalah, artikel, jurnal, internet serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Selain itu, data sekunder penelitian ini dari dokumen Dinas Sosial Kota Yogyakarta, dokumen dari Badan Usaha Logistik (Bulog) Divisi Regional DIY, dokumentasi dari Bank Negara Indonesia (BNI) dan pengelolaan E-Warong Kube Jasa yang didapat melalui internet dan website maupun secara langsung.

3. Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di e-Warong Kube Jasa Sejahtera Wirobrajan yang berada di Jl. Masjid Pakuncen WB 1/426 RT. 20, RW 04, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Pemilihan dari obyek dan lokasi penelitian tersebut, berdasarkan jumlah e-Warong yang telah

beroperasi di Kota Yogyakarta. Hal ini, karena e-Warong yang telah terlaksana sebanyak 12 e-Warong dan 8 e-Warong masih dalam tahap proses operasional. Salah satu e-Warong yang telah beroperasi di Kota Yogyakarta adalah e-Warong Kube Jasa Sejahtera Wirobrajan yang terletak di Kelurahan Pakuncen. E-Warong telah beroperasi selama 6 bulan, sehingga dapat dilakukan analisis terkait pengelolaan e-Warong di Kelurahan Pakuncen tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa teknik yaitu : teknik dokumentasi, wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dan bertatap muka dengan narasumber yang ingin diwawancarai. Selain itu, wawancara sangat membantu dalam penelitian, karena mampu mengetahui dan memahami persoalan-persoalan informasi yang terkait dengan tata kelola program e-Warong agar lebih jelas dan akurat. Wawancara dalam penelitian ini, dilakukan bersama narasumber terkait seperti anggota pengelola e-Warong Kube Jasa dan Staff bagian Penyuluh Sosial di Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi obyek yang terkait, bagaimana keadaan obyek yang dikaji dan kondisi sosial,

budaya serta lingkungan. Teknik observasi ini dilakukan dengan turun langsung ke obyek yang akan diteliti dan menulis hasil dari obyek penelitian tersebut. Dalam pelaksanaan e-Warong, peneliti turun langsung melihat tahapan-tahapan dalam kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan, sehingga dapat dilakukan analisis terkait tata kelola e-Warong tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik/cara pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi-informasi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Dokumentasi dapat berupa data arsip, makalah, artikel, jurnal, internet serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, dokumentasi yaitu hasil dari pelaksanaan kegiatan program e-Warong di Kota Yogyakarta. Kemudian, untuk pengumpulan data dapat dilihat dari dokumentasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Badan Usaha Logistik (Bulog) Divisi Regional DIY, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Pengelola e-Warong Kube Jasa.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan teknik untuk menganalisis data yang sudah ditemukan, baik itu berupa informasi dan data yang dapat mendukung pengembangan serta pengelolaan dalam penelitian. Data yang telah ditemukan akan dilakukan analisis lebih mendalam menggunakan teknis analisis berdasarkan teori-teori yang telah ditentukan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan secara keseluruhan dari data tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini, menurut (Moleong. J, 2014) terdiri dari 4 (empat) langkah yaitu:

- a. Melakukan pengelompokan (klasifikasi) data yang sama untuk mempermudah peneliti melakukan analisis.
- b. Melakukan deskripsi terhadap data atau informasi yang diperoleh.
- c. Melakukan intepretasi terhadap data menggunakan teori-teori yang telah ditetapkan dalam literatur review.
- d. Mendeskripsikan kesimpulan dari keseluruhan hasil dari data yang telah dianalisis.